

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Budihardjo, E. (1998). *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Bandung: Alumni.
- Eko Budihardjo. (1998). *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Bandung: Alumni.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- . (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- . (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- . (2016). *Hukum Administrasi Negara* (Ed. Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syarifuddin. (2015). *Otonomi Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan*. Jakarta: Kencana.
- Zairin Harahap. (2019). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2017.

C. JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

Hidayat, R. (2021). Kebijakan pengelolaan aset daerah. *Jurnal Hukum Indonesia*, 15(2), 120–135.

Islamiyah, S., Ismail, Y., & Humiati. (2025). Pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah terhadap penanggulangan bencana banjir. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 651.

Sodiqin. (2020). Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, 13(2), 141.

Sudiarawan, K. A., dkk. (2020). Revitalisasi pengelolaan aset daerah berbasis hukum administrasi negara. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(2), 315.

Syafa'atul Islamiyah, Y., Ismail, Y., & Humiati. (2025). Pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah terhadap penanggulangan bencana banjir. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 651.

Yus Erna, Lionardo, A., & Wulandari, N. (2023). Efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada BPBD Kabupaten Pali. *Journal of Law and Policy Review*, 2(1), 45.

Yeni, N. (2026). Sengketa tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing antara kaum Amir Hamzah Suku Koto Tjari dengan Pemerintah Kota Padang Panjang. *Jurnal Hasil Penelitian Hukum Universitas Andalas*, 39.

Zeak, W. A. H. (2020). Tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pemberian izin lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, 13(1), 22.

D. DOKUMEN LAIN, INTERNET, DAN WAWANCARA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang. *Analisis Risiko Bencana Daerah*. 2024. BPBD: Padang Panjang.

Data Lapangan Sektor Infrastruktur Air Bersih Kota Padang Panjang. 2026.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Aset*. 2026. Kemendikbud: Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kewenangan*. 2026. Kemendikbud: Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Tanggung Jawab*. 2026. Kemendikbud: Jakarta.

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. *Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang Nomor 00040/HP/BPN-03.03/XI/2022*. 2022.

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. *Surat Undangan Rapat Penelitian Kelayakan Penghapusan Nomor B/000.2.4/.../BPKD-PP/IV/2025*. 2025

